

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan moral generasi muda. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena konflik di kalangan santri semakin sering menjadi sorotan media. Berbagai pemberitaan nasional menyoroti kasus-kasus konflik antar santri, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun konflik nilai dan budaya. Menurut KH. Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Konflik yang terjadi di pesantren hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pendidikan karakter dan spiritualitas santri agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah (NU Online, 2023). Konflik ini tidak hanya terjadi di pesantren besar, namun juga di berbagai pondok pesantren di daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Ahmad Zainul Hamdi, pakar studi pesantren UIN Sunan Ampel Surabaya, Pesantren harus mampu menjadi tempat pembelajaran resolusi konflik dan toleransi, bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari (Hamdi, 2019, h. 36).

Konflik di lingkungan pondok pesantren di Indonesia semakin sering menjadi perhatian masyarakat luas. Dalam beberapa tahun terakhir, media nasional banyak memberitakan kasus kekerasan dan konflik antar santri, yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan pesantren. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia, dan hampir separuhnya terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Dari kasus-kasus tersebut, KPAI mencatat bahwa 30-40 persen di antaranya terjadi di lembaga pendidikan keagamaan, dengan tren kasus kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Konflik yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga perselisihan verbal dan konflik nilai yang berakar pada perbedaan latar belakang santri serta dinamika relasi antara santri senior dan junior. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik antar santri merupakan masalah nyata yang perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak terkait demi menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi para santri.

Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia juga tidak luput dari permasalahan konflik santri. Penelitian Ahmad Natsir dan Khabibur Rohman (2024) menemukan bahwa dari 15 kasus kekerasan berujung kematian di pesantren pada periode 2022–2024, sebanyak 80% terjadi di Pulau Jawa dan 67% pelakunya adalah santri senior atau pengurus yang diberi kepercayaan oleh pihak pesantren. Konflik ini juga tercermin dari sejumlah kasus yang terjadi di Jawa Timur pada awal 2024. Dalam 2 bulan pertama tahun 2024, tercatat tiga kasus penganiayaan santri di Jawa Timur, yaitu di Blitar, Malang, dan Kediri. Di Blitar, seorang santri 13 tahun meninggal dunia setelah dianiaya oleh 17 orang sesama santri dengan motif dugaan pencurian barang teman, yang berujung pada pengeroyokan hingga korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal. Di Malang, seorang santri 15 tahun mengalami luka bakar akibat disetrika oleh seniorinya, bermula dari gurauan yang berujung kekerasan fisik. Sementara di Kediri, seorang santri 14 tahun meninggal dunia setelah dianiaya oleh 4 seniorinya di sebuah pondok pesantren yang ternyata tidak memiliki izin operasional. Pola kekerasan di Blitar dan Kediri hampir serupa, yakni melibatkan kekerasan fisik oleh santri senior terhadap junior, meski motifnya berbeda (CNN Indonesia, 2024, Tempo, 2024, Republika, 2024). Fenomena-fenomena ini mempertegas bahwa kekerasan di lingkungan pesantren, khususnya di Jawa Timur, merupakan masalah nyata yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak.

Pada akhir tahun 2024, beberapa kasus konflik komunikasi antar santri juga

dilaporkan terjadi di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Berdasarkan pemberitaan media lokal, konflik tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan persepsi, ketidakjelasan pesan dari pengurus, serta kurangnya komunikasi efektif antara santri dan pengurus pondok. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Kabupaten Jember, pada Desember 2024, di mana ketegangan antar kelompok santri berawal dari miskomunikasi terkait jadwal kegiatan dan pembagian tugas harian. Konflik ini sempat memicu keributan kecil yang kemudian berhasil diredam setelah pengurus pesantren mengadakan mediasi dan pertemuan bersama seluruh santri untuk memperbaiki komunikasi internal (Jatim Times, 2024). Selain itu, penggunaan media sosial di kalangan santri juga menjadi faktor baru yang memicu kesalahpahaman dan memperburuk konflik yang ada. Penelitian oleh Sari (2023) dalam Jurnal Komunikasi Islam menemukan bahwa penggunaan media sosial tanpa pengawasan dapat memperbesar potensi konflik di lingkungan pesantren. Situasi ini menuntut adanya manajemen konflik komunikasi yang tepat agar tujuan pendidikan dan pembentukan karakter santri dapat tercapai secara optimal.

Manajemen konflik yang efektif di lingkungan pesantren sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan adanya strategi penyelesaian konflik yang tepat. Penelitian oleh Maulana (2021) dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam menunjukkan bahwa gaya manajemen konflik yang sering digunakan di pesantren meliputi kolaborasi, kompromi, dan mediasi. Namun, efektivitas gaya tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbukaan komunikasi antara santri, pengurus, dan pihak lain yang terlibat. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan memperbesar potensi terjadinya kesalahpahaman dan konflik di antara santri maupun antara santri dengan pengurus.

Konflik ini juga terjadi di Pondok Pesantren MIA Tulungagung, khususnya pada akhir tahun 2024. Berdasarkan hasil observasi dan pemberitaan internal pondok, ditemukan beberapa kasus konflik komunikasi antar santri putri yang berujung pada pelanggaran kedisiplinan. Konflik tersebut dipicu oleh perbedaan persepsi, ketidakjelasan pesan dari pengurus, serta kurangnya komunikasi efektif antara santri dan pengurus. Kondisi ini menuntut adanya manajemen konflik komunikasi yang tepat agar tujuan pendidikan dan pembentukan karakter santri dapat tercapai secara optimal.

Tantangan komunikasi ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi yang lebih baik untuk membentuk kedisiplinan melalui komunikasi yang efektif di pondok. Pengurus perlu lebih aktif dalam berkomunikasi dengan santri, baik secara formal maupun informal. Komunikasi yang jelas dan konsisten dapat membantu santri memahami dan menerima aturan dengan lebih baik. Selain itu, pengurus juga perlu memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih intensif kepada santri, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk mematuhi aturan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mengambil judul penelitian, “Konflik Komunikasi pada Pondok MIA Tulungagung dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Putri”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konflik komunikasi pada Pondok MIA Tulungagung dalam membentuk kedisiplinan santri putri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi konflik komunikasi pada Pondok MIA Tulungagung dalam membentuk kedisiplinan santri putri.
2. Untuk menganalisis konflik komunikasi pada Pondok MIA Tulungagung dalam membentuk kedisiplinan santri putri.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang berkaitan dengan konflik yang dilakukan dalam membentuk kedisiplinan pada santri dan dapat menjadi rujukan atau referensi tambahan bagi pembaca dalam membentuk kedisiplinan, khususnya di Pondok MIA Tulungagung.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya khususnya untuk mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dan diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis sebagai masukan bagi Pondok MIA Tulungagung dalam membentuk kedisiplinan santri.